

KEBANGKITAN NASIONAL MENGINSPIRASI JEJAK LANGKAH KEARSIPAN DI INDONESIA



Delapan tokoh Boedi Oetomo, di halaman Gedung *School tot Opleiding van Inlandsche Artsen* (STOVIA) Sekolah Kedokteran untuk Bumiputera, 1908. Duduk dari kiri ke kanan: Goenawan Mangoenkoesoemo, Latumeten, Moh. Arsjad, Angka Prodjosuedirdjo. Berdiri dari kiri ke kanan: Moh. Saleh, Soesilo, Soetomo, Gumbrek

Bagi bangsa Indonesia, perjuangan bangsa tidak melulu melalui kedahsyatan senjata saja, namun perjuangan dalam bentuk pergerakan moral untuk mewujudkan persatuan bangsa merupakan titik balik perlawanan melawan penjajah. Pergerakan kecil diibaratkan sebagai kehidupan yang tumbuh menjadi pohon kesadaran yang menyebarkan benih-benih baru dan telah mengilhami rasa kebersamaan maupun rasa memiliki diantara para pribumi dan priyayi terhadap bangsa Indonesia,

Salah satu pergerakan yang kemudian menjadi inspirasi bagi perkumpulan lain adalah keprihatinan sekelompok priyayi yang bersekolah di Sekolah Dokter Jawa terhadap dunia pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Hindia Belanda. Di mana sekolah tidak mendidik anak-anak pribumi Indonesia supaya menjadi orang yang berderajat tinggi, tidak untuk memelihara cita-cita kemanusiaan, untuk menjadi manusia dan bangsa yang sejajar dengan manusia dan bangsa di dunia lainnya. Sebaliknya, pendidikan hanya mendidik pribumi sebagai pelayan

yang patuh dan setia, menjadi alat dan kaki tangan penjajah, yang dapat bekerja hanya untuk kepentingan majikan semata-mata. Berawal dari keprihatinan ini maka mereka sepakat membentuk perkumpulan BOEDI OETOMO di gedung STOVIA (*School Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen*)-tempat Sekolah Dokter Jawa yang telah ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi Kedokteran.

Berdirinya BOEDI OETOMO 20 Mei 1908 yang kemudian oleh pemerintah, kita peringati sebagai hari Kebangkitan Nasional disebut-

LAPORAN UTAMA

sebut sebagai 'embrio' dari sebuah organisasi modern yang menjiwai kebangkitan seluruh komponen bangsa untuk meneguhkan cita-cita bangsa Indonesia. Menurut sejarawan Bonnie Triyana, meskipun masih ada diskusi panjang lebar mengenai apakah benar BOEDI OETOMO merupakan organisasi modern pertama yang mengawali tumbuhnya nasionalisme, namun harus diingat juga bahwa melihat sejarah bukan hanya siapa yang lebih dulu, melainkan siapa yang mendatangkan kegunaan bagi pembebasan nasional Indonesia, dengan demikian organisasi-organisasi lain seperti *Indische Partij*, Sarekat Islam, dan bahkan Partai Komunis Indonesia pun bisa dihitung sebagai organisasi yang menyumbangkan kekuatan bagi bangkitnya rasa nasionalisme Indonesia.

Bonnie Triyana yang aktif menulis sejarah pergerakan Indonesia di surat kabar ini selanjutnya menambahkan, tentunya banyak arsip yang menarik dan dijadikan bukti apabila dikaitkan dengan kebangkitan nasional, namun secara pribadi saya lebih menyukai catatan personal dari para aktivis gerakan nasionalisme Indonesia, bisa berupa surat atau artikel yang mereka tulis di media massa, karena sesungguhnya mencerminkan bagaimana pandangan para tokoh terhadap persoalan yang dihadapi bangsa pada masa lalu.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Drs. Mustari Irawan, MPA, bahwa apabila kita mundur kebelakang sebelum tahun 1908 sebenarnya sudah ada beberapa organisasi yang muncul sebelum BOEDI OETOMO. Dalam



Bonnie Triyana

“**Kebangkitan nasional harus dipahami dalam konteks zamannya sehingga makna yang tersirat dari ‘kebangkitan nasional’ harus memberi makna bagi kehidupan di zamannya**”

perspektif sejarah, kehadiran BOEDI OETOMO bukan sekedar terbentuknya perkumpulan orang sekolahan saja tetapi bagaimana perkumpulan priyayi Jawa sebagai kelompok intelektual pada masa itu berpikir bagaimana membangun Indonesia kedepannya, membangun kesadaran terhadap rasa nasionalisme, kesadaran terhadap kebangsaan yang harus dibangun

supaya mereka sadar tentang rasa nasionalismenya, tuturnya.

Terkait dengan khazanah arsip tentang peristiwa kebangkitan nasional antara tahun 1890 s.d. 1945, diakui oleh Kepala ANRI masih sedikit namun dalam *mail reporten* sudah ada. Sejauh ini yang ada adalah arsip-arsip tentang peringatan hari kebangkitan nasional bukan kepada saat bersamaan dengan peristiwa kebangkitan nasional itu sendiri. Sampai sekarang ANRI masih terus menelusuri arsip-arsip yang terkait langsung dengan peristiwa ataupun pergerakan yang mengilhami kebangkitan nasional, baik itu penelusuran kepada ahli waris para pendiri tokoh pergerakan nasional maupun saksi perorangan yang dekat dengan peristiwa tersebut. Sementara mengenai akses arsip terhadap peristiwa kebangkitan nasional, prinsipnya semua terbuka untuk publik

Bonnie Triyana yang juga pemimpin redaksi majalah *Historia* menambahkan, Kebangkitan nasional harus dipahami dalam konteks zamannya sehingga makna yang tersirat dari 'kebangkitan nasional' harus memberi makna bagi kehidupan di zamannya, bahwa kebangkitan nasional di zaman sekarang harus dipahami sebagai momentum untuk melakukan berbagai macam perubahan untuk perbaikan kehidupan rakyat. Indonesia harus menjadi sebuah negara kesejahteraan yang mendatangkan kemakmuran dan memberikan jaminan terbaik bagi rakyatnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi



Kepala ANRI Mustari Irawan

“ esensi suatu kebangkitan itu adalah suatu perubahan dari suatu kondisi kepada kondisi yang lebih baik ”

Birokrasi, Tasdik Kinanto menjelaskan, bahwa perubahan untuk perbaikan kehidupan rakyat, salah satunya diemban juga oleh aparatur negara dengan cara mengambil peran dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi di setiap penyelenggaraan negara. Baginya, reformasi birokrasi dapat dimaknai sebagai kebangkitan, sebagai upaya untuk membangun bangsa melalui pembenahan birokrasi. Reformasi birokrasi pada hakekatnya mengajak kita untuk melakukan hal yang lebih baik dalam hal tata kelola pemerintahan, perubahan yang terencana, sistemik dan melibatkan *stakeholder* terkait

serta dengan tujuan dan strategi yang jelas, yang harus dilakukan oleh semua elemen pemerintahan, baik di pusat dan daerah. Salah satu alat yang digunakan untuk mewujudkan birokrasi yang modern adalah undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), tutur pria yang memulai kariernya sebagai pegawai Sekretariat Negara yang diperbantukan pada Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.

Selanjutnya, Tasdik Kinanto yang mengemban jabatan Sesmenpan sejak tahun 2007, dalam penjelasannya mengatakan bahwa

untuk mewujudkan *good governance* maka reformasi birokrasi menuntut adanya akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan negara. Oleh karenanya dibutuhkan pengelolaan informasi melalui sistem kearsipan yang terpadu, terintegrasi, lengkap dan modern. Menurutnya, mengurus arsip merupakan tugas mulia, karena proses menata arsip yang baik juga merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Menjadi orang kearsipan harus bangga karena dia melakukan sesuatu yang berguna bagi bangsa, imbuh Tasdik Kinanto yang kariernya sebagai Sesmenpan sempat melayani tiga orang menteri : Taufik Effendi, EE. Mangindaan, dan Azwar Abubakar

Dalam suatu wawancara terpisah, Kepala ANRI Drs. Mustari Irawan, MPA juga mengatakan bahwa esensi suatu kebangkitan itu adalah suatu perubahan dari suatu kondisi kepada kondisi yang lebih baik, setiap perubahan yang dilakukan berharap lebih baik. Begitupun dalam bidang kearsipan, perubahan sesungguhnya sudah dimulai dengan munculnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan. Namun seiring dengan perubahan zaman maka dilakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Perubahan yang dimaksud tentunya kearah yang lebih baik, tutur kandidat doktor bidang Ilmu Administrasi Universitas Indonesia ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan terjadi perubahan yang sangat besar, kata Mustari Irawan yang sampai saat ini masih merangkap sebagai Deputi

LAPORAN UTAMA

bidang Konservasi ANRI. Perubahan yang dimaksud mulai dari konsep, terminologi arsip, maupun pengaturan arsip sejak proses penciptaan dan bagaimana memperlakukannya, termasuk hak akses arsip bagi masyarakat. Semuanya itu diharapkan bermuara bagi ANRI yang mengemban fungsi sebagai pembina penyelenggaraan kearsipan nasional, dimana diharapkan pengelolaan arsip dinamis mampu memperlihatkan kepentingan akuntabilitas dan transparansi bagi organisasi atau lembaga. Pada sisi lain, sempurnanya penyelenggaraan kearsipan statis sangat terkait dengan khazanah *memory collective* sebagai bagian dari *national heritage*.

Menurut Kepala ANRI, Undang-Undang Kearsipan ini cakupannya juga lebih luas, peran lembaga kearsipan memperlihatkan pembagian fungsi-fungsi yang sejalan dengan sistem pemerintahan kita yang menganut desentralisasi. Selain itu, tutur pria yang menekuni hobi menulis puisi ini, masalah kearsipan bukan semata-mata tanggung jawab lembaga atau pemerintah saja tetapi masyarakatpun ikut diberdayakan dalam pelibatannya untuk menyelamatkan arsip. Hal ini diikuti dengan adanya sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi siapapun yang lalai terhadap arsip, imbuhnya.

Lebih jauh Kepala ANRI dalam penjelasannya tentang strategi yang akan dilakukan ANRI sejalan dengan spirit kebangkitan bangsa di bidang kearsipan adalah mengubah *mind set* dan *culture set* sehingga ketika kita bekerja di bidang kearsipan harus memperlihatkan bahwa arsip

mempunyai peran yang lebih. Sebagai contoh, dalam mengelola arsip dinamis bagaimana arsip itu menjadi salah satu objek persyaratan dalam pemeriksaan oleh para auditor. Kalau ini berhasil maka dengan sendirinya lembaga akan lebih peduli untuk mengelola arsip dinamis secara tertib di lembaga atau instansinya masing-masing. Kemudian yang terkait dengan pengelolaan arsip statis adalah meyakinkan bahwa seluruh lembaga kearsipan baik itu provinsi, kabupaten/kota, dan perguruan tinggi mampu secara optimal menyimpan *memory collective* daerah dan lingkungannya masing-masing. Keberadaan khazanah tersebut diharapkan bisa menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lewat pembuktian dari arsip yang dikelolanya.

Dalam kesempatan terpisah, Tasdik Kinanto memaparkan bahwa kebangkitan dalam bidang kearsipan dapat diwujudkan ANRI dengan mencari cara bagaimana menjadi leader, mendorong, mengkomunikasikan, mensosialisasikan secara tuntas supaya masyarakat dan penyelenggara negara menyadari betapa pentingnya arsip, tutur pria kelahiran Banyumas yang saat ini menjadi salah satu calon anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pendapat Sesmenpan dan Reformasi Birokrasi ini tentunya akan menjadi pendorong bagi Drs. Mustari Irawan selaku Kepala ANRI guna mewujudkan visi dan misinya, termasuk arahan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat pelantikan Desember 2013 lalu, yaitu bagaimana mengenalkan arsip sebagai bagian dari peningkatan pendidikan di sekolah.

Untuk mewujudkan itu, maka ANRI beserta jajarannya termasuk arsiparis harus bersinergi dalam melakukan pembinaan sistem kearsipan dan melaksanakan undang-undangnya. Khusus arsiparis, Mustari Irawan berharap bahwa kedepannya harus ada arsiparis ANRI yang mampu mengambil peran sebagai nara sumber dalam setiap momen yang terkait dengan masalah kearsipan, paparnya serius. Oleh karenanya, dirinya tak segan-segan memberikan kesempatan kepada arsiparis untuk berkiprah sebagai pembicara dalam forum SARBICA nanti. Ini semata-mata murni keinginan beliau guna mengangkat profesi arsiparis sehingga mampu sejajar dengan profesi lainnya, seperti peneliti maupun pustakawan.

Bagaimanapun juga peristiwa kebangkitan nasional dengan segala maknanya telah menginspirasi langkah kearsipan di Indonesia, bukan hanya kedekatan peringatan hari Kebangkitan Nasional dengan hari Kearsipan (tanggal 18 Mei) saja yang terpaut dua hari, tetapi juga rekam jejak spirit kebangsaan seyogyanya mampu menjiwai pelaku-pelaku kearsipan untuk sadar bergerak cepat dan tepat guna memberi peran arsip yang lebih baik dan ber'nas, sekali lagi semata-mata untuk kepentingan lembaga maupun negara. Semoga ANRI tetap jaya ! (BP. Widodo)